



RAPAT KERJA & KONSULTASI NASIONAL RAKERKONAS APINDO KE-31

Upaya Bersama Memutus Pandemi COVID-19 dan Membangkitkan Ekonomi

Jakarta, 24 Agustus 2021

DAFTAR ISI

PEMBUKAAN RAKERKONAS

- Laporan Ketua Panitia Rakerkonas APINDO ke-31	1
- Sambutan Ketua Umum APINDO	2
- Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan APINDO	3

CEO DIALOGUE

- Paparan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi RI	4
- Sesi Tanya Jawab bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi RI	5
- Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI	7
- Sesi Tanya Jawab bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI	9
- Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI	12
- Sesi Tanya Jawab bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI	13
- Paparan Menteri Ketenagakerjaan RI (Tapping)	15

PEMBUKAAN SIDANG PLENO

- Pembacaan Tata Tertib Rakerkonas APINDO ke-31	18
- Pemaparan Kegiatan DPN APINDO 2020 - 2021	
1. Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial	19
2. Bidang Perbankan, Jasa Keuangan, Pasar Modal, dan Perpajakan	20
3. Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Khusus	21
4. Bidang UMKM	22
5. Bidang Perikanan	23
6. Bidang Peternakan	23
7. Bidang Pertanian	24
8. Bidang Perhubungan	24
9. Bidang Perdagangan	25
10. Bidang Kebijakan Publik	25
11. Bidang Organisasi	25
12. Bidang Hubungan Internasional	26

PENUTUPAN RAKERKONAS

- Pembacaan Rekomendasi Rakerkonas APINDO 2021	
Bidang Keorganisasian	27
Bidang Program Kerja	27
Bidang Rekomendasi Kebijakan	30

DOKUMENTASI	33
LAMPIRAN	36

LAPORAN KETUA PANITIA



EDDY HUSSY

Sekretaris Umum APINDO

1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam acara Rakerkonas APINDO 2021 yang diselenggarakan secara online. Tahun 2020 yang lalu kita juga menyelenggarakan Rakerkonas secara online. Sejumlah rapat di APINDO selama hampir dua tahun ini juga lebih banyak diselenggarakan secara online, hal ini mengingatkan kepada kita semua untuk terus menjaga diri kita dan orang lain agar tidak berkerumun selama masa pandemi.

Kita mendoakan agar rekan rekan dan saudara kita yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19 bisa pulih dan kembali sehat seperti sedia kala dan kita semua yang sehat bugar bisa berupaya membantu mencegah penyebarluasan pandemi ini.

1. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan,
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto
3. Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha selaku Sekretaris Jenderal
4. Dan Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah

Acara CEO Dialogue dipandu oleh Ketua Umum APINDO, Bapak Hariyadi Sukamdani dan Wakil Ketua Umum APINDO, Ibu Shinta Wijaya Kamdani.

Para Menteri berdialog dengan kita semua dan memberikan paparan mengenai harapan dan perkembangan perekonomian negara kita yang dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini.

Tentu sebagai bagian dari pemangku kepentingan di Negara ini, APINDO akan terus menerus bersinergi bersama pemerintah dengan tetap mengedepankan sikap kritis yang konstruktif.

Rakerkonas APINDO 2021 juga membahas dinamika organisasi APINDO. Dalam pembahasan dinamika organisasi APINDO, Bapak Ibu akan dipersilahkan untuk bergabung dalam pilihan 3 (tiga) komisi. Komisi 1 membahas Organisasi, Komisi 2 membahas Program Kerja, dan Komisi 3 membahas Rekomendasi Kebijakan Publik.

Sebagian dari para pengurus DPN APINDO memimpin sidang sidang komisi tersebut, sesuai dengan AD ART APINDO dan sesuai dengan penugasan yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semua.



Bapak Ibu yang kami hormati, Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO adalah amanah AD ART APINDO yang diikuti oleh keluarga besar APINDO di seluruh Indonesia. Sesuai dengan konfirmasi yang dihipunkan oleh Panitia, tercatat sebanyak 400 an peserta terdiri ALB (Anggota Luar Biasa), Anggota, Pengurus baik di tingkat DPN ataupun DPP dan DPK menyatakan siap mengikuti Rakerkonas.

Dalam Rakerkonas 2021 ini mengambil tema UPAYA BERSAMA MEMUTUS PANDEMI COVID-19 & MEMBANGKITKAN EKONOMI. Sebuah tema yang dipilih dalam suasana optimisme kita bersama, bahwa Indonesia akan mampu keluar dari Pandemi ini dalam waktu cepat. Rakerkonas APINDO 2021, dibarengi dengan acara CEO Dialogue, yang sangat menarik yang akan terus membangkitkan optimisme perekonomian negara kita. Dalam CEO Dialog nanti akan hadir bersama kita:

Dalam kesempatan waktu terbatas ini, disampaikan pula paparan singkat oleh beberapa DPP APINDO, yang dipilih berdasarkan wilayah koridor ekonomi. Mohon dimaklumi sebesarnya, bahwa karena waktu yang sangat terbatas, hanya 5 DPP APINDO yang bisa memaparkan capaian kegiatan dan program kerja.

Tentu keterbatasan ini terjadi semata mata karena waktu dan kami memahami bahwa semua Pengurus DPP APINDO sudah sangat baik adanya. Demikian, kami laporkan.

Sebagai Ketua Panitia Rakerkonas APINDO 2021, saya mengajak kita semua untuk selalu mengedepankan kerja kerja kita di APINDO dengan semangat persaudaraan dan kekeluargaan demi terwujudnya iklim investasi yang semakin baik sehingga APINDO bisa terus menerus berperan penting dalam hal penciptaan lapangan kerja anak bangsa dan negara RI. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Rakerkonas APINDO ini.



SAMBUTAN

2

HARIYADI B. SUKAMDANI

Ketua Umum APINDO

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pelaksanaan RAKORKONAS 2021 sebagai pelaksanaan RAKORKONAS ke-2 kalinya yang dilakukan secara virtual. RAKORKONAS kali ini merupakan laporan dan evaluasi terhadap program kerja 1-tahunan sekaligus menyusun rencana kerja untuk 1 tahun kedepan.

Di dalam masa pandemi yang belum berakhir ini, intinya adalah bagaimana kita berupaya menyelamatkan dunia usaha kita, terutama

biaya medis penyuntikan dan lainnya tentu akan ada penambahan biaya medis penyuntikan (layanan kesehatan) tergantung lokasi faskes yang melayani vaksinasi tersebut.

Kami juga melakukan advokasi di bidang perpajakan, khususnya UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Juga, APINDO sedang membahas moratorium PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Kepailitan. APINDO mengusulkan adanya perpanjangan 3 tahun namun APINDO tidak tahu Pemerintah menginginkannya seperti apa, dan diharapkan adanya Perppu untuk mengatur itu.

APINDO juga telah berdiskusi dengan Ketua OJK Bapak Wimboh Santoso untuk membahas perpanjangan POJK 48/2020 untuk 3 tahun ke depan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan demi menyelamatkan dunia usaha kita agar mampu melewati krisis akibat pandemi yang berkepanjangan ini.

Yang harus kita munculkan disini adalah optimisme untuk melewati pandemi ini. Dasarnya adalah Pemerintah berkomitmen untuk melakukan 3 T (Testing, Tracing, Treatment) dan vaksinasi secara massal yang dipercepat.

Selain itu, Pemerintah juga mendengarkan dunia usaha mengenai upaya-upaya prioritas yang diperlukan untuk melonggarkan PPKM.

Pemerintah masih mengalami kendala dalam keterbatasan belanja anggarannya. Dan anggaran untuk stimulus 2021 sebesar Rp 744,77 triliun dimana realisasinya sampai Agustus 2021 adalah sebesar Rp 320 triliun. Artinya penyerapannya dinilai masih cukup rendah. APINDO juga melihat bagaimana besaran stimulus yang diperuntukkan untuk membantu korporasi.

APINDO juga berharap agar jangan sampai penanganan virus pandemi ini dapat terkelola, namun justru pemulihan ekonomi dan kegiatan usaha tidak terkelola dengan baik. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita dapat menangani pandemi ini secara gotong royong serta secara terintegrasi.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



ma anggota APINDO.

Beberapa regulasi yang awalnya kita khawatir akan bersikap kontraproduktif, akhirnya dapat disahkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, terutama UU Cipta Kerja yang diikuti turunannya yaitu beberapa Peraturan Pemerintah (PP).

Selain itu, keberhasilan juga dicapai melalui upaya rekomendasi APINDO terhadap penurunan harga tes PCR menjadi lebih rendah sesuai dengan yang diumumkan Presiden. Diharapkan dengan harga tes yang lebih rendah, tes dapat diperbanyak serta diperluas.

Untuk isu vaksinasi, dengan dukungan DPP-DPP APINDO di berbagai daerah, seperti DPP APINDO Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, maka sudah sekitar 500.000 dosis vaksin yang sudah diberikan. Dan di Agustus serta September 2021, akan ada dukungan vaksin dari OJK sekitar kurang lebih 600.000 dosis. Inilah salah satu partisipasi APINDO terhadap masyarakat dan pekerja dunia usaha.

Selain itu, vaksin gotong royong harganya juga sudah diturunkan menjadi 188.000 sehingga nantinya diharapkan akan semakin memperluas target vaksinasi masyarakat. Namun,

SAMBUTAN

SOFJAN WANANDI

Ketua Dewan Pertimbangan APINDO



Selamat Pagi,

Bagaimana dunia usaha secara solid bersama Pemerintah menangani pandemi ini bersama-sama. Kita tidak menyangka bahwa pandemi ini ternyata tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Dengan diturunkannya PPKM dari level 4 ke level 3 maka tentunya dunia usaha diharapkan dapat bergerak lebih menggeliat lagi untuk pulih.

Saya menyoroti masalah perpajakan yang pembahasan Undang - Undang nya sedang dilakukan, maka dunia usaha berpotensi dihantam lebih berat lagi dengan beban perpajakan yang masih belum pasti seberapa besar akan dikenakan.

Oleh karena itu kedepannya bagaimana APINDO bersama dengan KADIN melakukan pembahasan dengan parlemen agar pengesahan UU terkait perpajakan tersebut nantinya benar-benar tidak menjadi beban yang dapat memperberat kondisi pelaku usaha yang sudah mengalami tekanan.



Dengan menurunnya angka kasus Covid-19 di Jawa namun di luar Jawa masih cukup tinggi, bagaimana kedepannya DPP-DPP APINDO dapat ikut berperan melalui vaksin gotong royong.

Beberapa daerah yang menghasilkan *resources* dalam jumlah besar dan bersumbangsih besar terhadap nilai tambah dan bagaimana daerah-daerah diluar Jawa tersebut semestinya mampu mempercepat vaksinasi gotong royong, karena kalau menunggu Pemerintah bisa cukup lama. Untuk itu, APINDO (DPP) agar mengambil

inisiatif agar Pemerintah dapat mempercepat vaksinasi, terutama di sentra-sentra bisnis prospektif diluar Jawa.

Disaat krisis 1997/1998, yang terdampak signifikan terutama adalah korporasi besar. Sedangkan untuk krisis akibat pandemi ini yang terkena terbesar adalah perusahaan-perusahaan kecil.

Selain itu, peran DPN APINDO dalam mengkoordinasikan perusahaan-perusahaan besar yang tidak terlalu terdampak agar bersama-sama dapat membantu perusahaan UMKM yang sangat terdampak dalam jumlah besar. Tanpa menyelesaikan pandemi ini, maka ekonomi tidak dapat berjalan dan pulih. Agar APINDO (melalui DPP) dapat membantu percepatan vaksinasi terutama diluar Jawa.

CEO DIALOGUE

4

Pemanfaatan Iklim Investasi & Reformasi Struktural Indonesia Untuk Pemulihan Ekonomi

Oleh: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi RI

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- Penanganan pandemi oleh Pemerintah dilakukan dengan terus menambah kapasitas faskes yang ada seperti tempat tidur rumah sakit, ketersediaan oksigen dan lain sebagainya.
- Volume dan percepatan vaksinasi terus dilakukan, dimana Pemerintah terus menstimulasi peran industri vaksin nasional. Juga, melakukan kerjasama dengan sejumlah produsen vaksin internasional, terutama dengan RRT. Dari domestik, kita juga mendorong produksi vaksin merah putih, dan rencana akan mulai produksi pada Mei 2022 mendatang.
- Pemerintah juga mempersiapkan prosedur pelaksanaan (SOP) agar di periode 18-31 2021 ini sektor-sektor industri strategis dan esensial agar dapat beraktivitas penuh dengan kehadiran 100% pekerja (minimal 2 shift). Juga, mengupayakan peningkatan kapasitas operasional tenant dan pengunjung mall hingga kapasitas 50%.
- Di beberapa kota besar, sekitar 4 kota besar, uji coba protokol kesehatan di pusat-pusat perbelanjaan kota-kota tersebut dinilai Pemerintah telah berjalan dengan baik.



- Perkembangan ekonomi Indonesia kita harapkan dapat mengarah kepada perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Pemerintah memang sedang menyiapkan fasilitas R&D, dan sektor usaha dapat menjadikannya sebagai sektor potensial untuk berusaha.
- Ekspor nasional juga diarahkan untuk pengembangan hilirisasi industri. Misalnya produsen komoditas nikel diarahkan agar berfokus ke stainless steel untuk kemudian dapat memproduksi baterai.
- Berbagai negara di dunia belum ada satupun yang dapat mencapai herd immunity secara penuh. Namun Indonesia terus berusaha mengendalikan pandemi dengan berbagai cara, salah satunya melalui Test, Tracing, Treatment (3T).
- Sebelum penerapan PPKM Darurat, ternyata realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 Indonesia menghasilkan pertumbuhan 7,07% sebagai indikasi bahwa kita telah keluar dari resesi. Selain itu, realisasi investasi asing meningkat signifikan (18% y-o-y), realisasi investasi domestik juga meningkat.
- Hal-hal lainnya yang menjadi perhatian penting kami untuk diintensifkan pelaksanaan dan pengawasannya : Penguatan Implementasi P3DN, pengembangan kawasan industri wilayah Kalimantan, perencanaan sintesis Amonia Hijau FFI, melalui investasi USD 2,5 milyar. Selain itu concerns lainnya adalah lingkungan hidup, inovasi cuaca, energi dan ketahanan pangan serta pertahanan dan keamanan. Concern lainnya adalah penerapan teknologi menuju Indonesia emas.

SESI TANYA JAWAB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi RI Pertanyaan:

- Bagaimana upaya Pemerintah untuk memperluas vaksinasi ke daerah-daerah lain di luar Jawa-Bali? Terutama ke Lampung?
- Isu keterbatasan anggaran penanganan pandemi di wilayah Bali.
- Situasi perbatasan dengan beberapa negara ASEAN.
- Bila vaksin tidak mampu menangani varian virus delta, apa langkah Pemerintah terkait hal itu?
- Apakah vaksin booster dapat diberikan ke lansia, misalnya dengan vaksin Pfizer dan Moderna?
- Maluku Utara memiliki ekspor tinggi dari hasil tambang, namun daerah ybs ternyata tidak dapat menikmati hasil pertumbuhan ekspornya yang tinggi tersebut. Bagaimana dengan kondisi ini?
- Ocean freight meningkat 600%. Utamanya akibat kelangkaan container. Apa upaya Pemerintah agar kondisi tersebut tertangani.
- Pelaku usaha di NTT ingin membantu Pemerintah untuk menyelenggarakan vaksinasi, namun tidak memiliki akses informasi mengenai bagaimana mendapatkan akses vaksin.
- Bila pandemi berlangsung berlarut-larut, bagaimana prospek investasi di berbagai daerah?
- Bila strategi 3T Pemerintah tidak dapat berjalan secara masif, bagaimana daerah mengatasi pandemi dengan cepat?
- Adanya Kru kapal yang mendarat / berlabuh yang kesulitan memperoleh vaksin, mohon bantuan Pemerintah.
- Apakah orang yang telah divaksin di luar negeri bisa terhubung dengan aplikasi peduli lindungi?
- Akibat keterbatasan kontainer kapal untuk ekspor (seperti di Medan). Apakah memungkinkan untuk relaksasi agar dapat melakukan ekspor menggunakan kapal tongkang? Saat ini terkendala regulasi.
- Terkait Produk ekspor perikanan Indonesia ke China dituduh tercemar COVID-19.
- APINDO meminta OJK memperpanjang relaksasi kredit hingga 3 tahun, tidak hanya sampai 1 tahun saja (POJK No. 48/2020).
- Perihal kasus PKPU dan perpailitan sudah menunjukkan gejala yang tidak sehat. Untuk itu, Dunia usaha dukung rencana Pemerintah untuk mengeluarkan Moratorium.
- Apakah memungkinkan menggunakan vaksin booster dari skema gotong-royong?



SESI TANYA JAWAB

6

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi RI

Jawaban:

- Stok vaksin di luar Jawa mencukupi, Lampung juga akan memperoleh stok vaksin dalam jumlah besar.
- Anggaran penanganan pandemi cukup besar, dengan tingkat vaksinasi sudah tinggi. Denpasar telah divaksinasi sebanyak 104%.
- Vaksin tetap berguna, angka kematian menurun dengan adanya vaksinasi.
- Silahkan apabila ingin menggunakan booster vaksin secara gotong royong. Pemerintah telah mempercepat pemberian booster vaksin kepada nakes.
- Pemerintah sudah cari jalan keluar tentang kelangkaan kontainer. Walaupun belum ada solusi / jawaban, namun Pemerintah terus mengupayakan.
- Vaksin yang diperoleh Indonesia cukup melimpah. Mendatang tentunya Pemerintah akan membantu NTT. Pemerintah akan mengkoordinasikan hal itu segera.
- Ada prediksi pandemi belum selesai hingga 2 tahun mendatang. Oleh karena itu strategi kita agar bagaimana hidup berdampingan dengan covid, melalui penerapan 3T dan 3M yang dilakukan secara konsisten.
- Pemerintah akan membuat sentra vaksinasi di berbagai bandara dan pelabuhan.
- Orang yang telah divaksin di luar negeri juga akan dicek apakah dapat didaftarkan ke aplikasi peduli lindungi.
- Permasalahan penggunaan kapal tongkang sebagai kapal ekspor juga akan dibahas bersama Pemerintah.
- China memperoleh frozen fish dari Eropa yang ternyata mengandung COVID-19. Oleh karena itu RRT sangat berhati-hati. Untuk itu, Pemerintah meminta pelaku usaha perikanan ekspor Indonesia agar lebih berhati-hati dan higienis.
- Pemerintah juga sedang memperhatikan perkembangan PKPU sedang berjalan dan sebenarnya sependapat dengan rencana perpanjangan POJK 48/2020 dari 1 tahun menjadi 3 tahun.
- Gotong royong bisa saja digunakan, namun di pabrik saja. Untuk booster, Pemerintah akan membahas untuk mencari jalan keluarnya.



CEO DIALOGUE

Peran Pemerintah untuk Pemulihan, Transformasi & Ketahanan Ekonomi dari Pandemi

Oleh: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI

AIRLANGGA HARTARTO

- Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 Indonesia bisa mencapai 7,07% karena varian Delta COVID-19 baru bergerak / melonjak di awal kuartal III 2021. Pertumbuhan TW II 2021 Indonesia ini sejalan dengan recovery yang dialami Vietnam sebesar 6,6% dan Korea Selatan 5,9% serta Singapura 14,3%. Singapura bisa setinggi itu karena basis pertumbuhannya dibandingkan terhadap tahun

Sedangkan Sektor Pertanian, Jasa Kesehatan, serta Telekomunikasi dan Informasi memang konsisten positif sejak tahun lalu.

- Salah satu tugas Pemerintah penting di waktu mendatang adalah memperbesar engine investasi. Pemerintah berharap di akhir 2021 realisasi investasi dapat mencapai sekitar Rp 900 trilyun.



- Tahun 2022 kita berharap dengan implementasi UU Cipta Kerja, Online Single Submission berbasis resiko serta Sovereign Wealth Fund Indonesia Investment.

- Dengan dukungan perangkat-perangkat tersebut kita harapkan realisasi investasi di 2022 sebesar Rp 1.200 trilyun.

- Pertumbuhan spasial Indonesia

2020 lalu yang sempat minus cukup besar. Demikian juga dengan recovery pertumbuhan TW II 2021 Amerika Serikat, Jerman, dan khususnya Tiongkok (RRT) yang konsisten positif sejak Semester II 2020 lalu.

bisa dilihat di Jawa yang didominasi Industri Pengolahan yang pertumbuhan TW II 2021 nya berada di atas pertumbuhan nasional. Kalimantan dan Sulawesi didominasi dengan pertumbuhan natural resources yang harganya meningkat. Sulawesi masih didominasi hasil tambang.

- Sektor-sektor yang solid positif di TW II 2021 adalah Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan, Dan Akomodasi Makan Minum.

CEO DIALOGUE

8

Peran Pemerintah untuk Pemulihan, Transformasi & Ketahanan Ekonomi dari Pandemi

Oleh: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI

AIRLANGGA HARTARTO

- Presiden telah meminta agar Pemerintah mempersiapkan Roadmap mengenai transisi dari pandemi menjadi endemi. Tentunya kondisi itu dapat dilakukan dengan landasan penurunan kasus harian.
- Kita juga berbagi tugas dalam memulihkan kondisi akibat pandemi terutama dalam hal non-medis namun tetap men-support pencapaian vaksinasi, terutama di luar Jawa.
- Masih rendahnya rasio vaksinasi di luar Jawa diharapkan dapat segera ditangani, namun rasio vaksinasi di Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara sudah melampaui angka rata-rata pencapaian vaksinasi secara nasional, dan daerah lain sedang di-upayakan percepatannya
- Peningkatan / percepatan juga dilakukan, dimana sebelumnya Sekjen Kemenkes RI menyatakan target testing & tracing adalah 1 : 10 (1 banding 10 kontak).
- Pemerintah sudah melakukan paket pemulihan ekonomi. Tahun ini merupakan tahap ke-2. Tahun 2020 lalu merupakan tahap ke-1 yang sudah dilakukan dengan kucuran dana sekitar Rp 700 trilyun. Tahun 2021 meningkat menjadi Rp 774,7 trilyun dengan penyerapan hingga Agustus 2021 sebesar 43,8%.
- Pemerintah juga sudah menyiapkan Program PEN untuk 2022, terutama untuk bidang Kesehatan (Rp 148,1 trilyun) dan Perlindungan Masyarakat (Rp 153,7 trilyun) dengan harapan sektor korporasi sudah mulai recovery di 2022.
- Pemerintah juga beberapa waktu lalu sudah meluncurkan OSS berbasis risk-assessment, yang diharapkan dapat dilakukan pembagian registrasi-registrasi usaha berbasis resiko rendah, menengah dan tinggi.
- Hingga akhir 2021 Pemerintah masih konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di range 3,30% yoy hingga 4,50% yoy dengan target pertumbuhan 2021 dalam APBN 2021 sebesar 5,00% yoy hingga 5,50%.



SESI TANYA JAWAB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI

Pertanyaan:

- Pemerintah sudah mulai menjalankan OSS tahap II yang berbasis resiko tersebut. Bagaimana progress nya hingga saat ini? Termasuk tanggapan-tanggapan yang diperoleh Pemerintah terhadap eksekusi pelaksanaannya? Pelaku usaha tentu sangat berharap pada kinerja OSS ini, terutama perijinan-perijinan daerah agar supaya bisa terintegrasi di dalam OOS tahap II ini.
- DPP APINDO Jawa Barat : apresiasi terhadap Pusat atas paket stimulus yang telah dikeluarkan. Dari sekian banyak paket tersebut, apakah ada yang berbentuk dana hibah untuk perusahaan kecil – menengah?
- Sektor Properti : apakah PPN 2021 dapat digeser/ dipindahkan/ diperpanjang menjadi serah terimanya di Juli 2022?
- Sektor Properti : terkait OSS tahap II, maka beberapa perijinan IMB belum dapat berjalan. Hal ini tentu terkait dengan isu pergeseran PPN 2021 tersebut ke 2022. Apa solusi dari Pemerintah?
- Bpk Yusran : OSS belum maksimal di daerah. Contohnya Supermarket. Ternyata masih diperlukan dari Dinas Perdagangan dan Dishub, dan masih ada ijin-ijin yang lain.
- DPP APINDO Bali : Pemerintah telah merencanakan subsidi upah sebesar Rp 8,8 trilyun. Apakah ditujukan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan dan yang mengalami pemotongan upah? Bagaimana juga distribusinya? Apakah sama dengan 2020 lalu dengan ditransfer langsung ke pekerja?
- Restrukturisasi hutang terkait POJK No. 48 / 2020. Pelaku-pelaku usaha di daerah masih banyak yang belum memperoleh kredit modal kerja dan usaha dari perbankan. Sedangkan data OJK memperlihatkan tren pertumbuhan kredit turun sedangkan dana pihak ke-3 di perbankan meningkat. Bagaimana tanggapannya?
- Ketua Umum APINDO : kami sudah berdiskusi dengan pelaku usaha serta dengan Perbanas, bahwa memang kami mengusulkan agar perpanjangan POJK 48/2020 dilakukan 3 tahun dan bukan 1 tahun karena proyeksi tidak dapat dilakukan secara baik dalam jangka waktu 1 tahun. Plafon sebelumnya juga Rp 10 milyar, dan sebaiknya kedepan agar besaran maksimalnya diserahkan kepada masing-masing bank. Justifikasi pemberian nya juga agar menganut pilar Cash Flow seperti yang diatur pada POJK 11/2020 sebelumnya. Bila menggunakan pilar resiko, proyeksi, dll justru bisa merepotkan untuk memperoleh kredit.
- POJK 48/2020 ini juga berkaitan dengan perkembangan peningkatan jumlah pengajuan PKPU dan Kepailitan. Khawatirnya banyak pihak yang memanfaatkan situasi kepailitan saat ini dari UU No. 37 Tahun 2014 untuk tujuan-tujuan yang kurang baik. Dimohon agar bisa dilakukan moratorium terhadap POJK 48/2020 menjadi diperpanjang hingga 3 tahun.
- DPP APINDO Riau : apa upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam bentuk apa? Dan bagaimana sumber devisa yang diupayakan Pemerintah sehingga dapat memenuhi APBN dan APBD? Bagaimana UU Cipta Kerja dapat mengatasi keterpurukan UMKM dalam bidang permodalan dan penjualan. Apakah beban perpajakan tetap dikenakan? Pengupahan juga apakah tetap sesuai UMK/UMP? Perijinan Usaha untuk Halal juga diperjelas, apakah ke BPOM? MUI? ataukah ke Kemendag? Mohon solusinya supaya tidak terjadi kebingungan dan dikotomi.

SESI TANYA JAWAB

10

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI

Jawaban:

- Secara sistem, OSS tahap II ini sudah live. Namun tentunya OSS tahap II ini tidak hanya sendirian saja di Pusat, tetapi juga di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota, OSS ini berada di bawah PTSP. Harapan tentunya agar terintegrasi sempurna dan maksimal. Dan OSS ini terutama berkaitan dengan Tata Ruang (RDTR). RDTR agar bisa diselesaikan diseluruh Kabupaten/Kota dan Propinsi, sehingga OSS tahap II ini akan lengkap untuk prosesnya. Apabila belum, maka di beberapa daerah tentu dapat terhambat perizinannya.
- Pemerintah akan mengevaluasi PPN Properti tersebut, tidak hanya untuk Jawa Timur. Tetapi Pemerintah akan menghitung kapan waktu serah terimanya dan persentasenya yang dapat dilakukan di 2022. Angkanya akan diumumkan karena masih menunggu audit.
- IMB dan IMB Tentu harus dicek ke daerah masing-masing, karena sifatnya sangat lokal di daerah masing-masing karena berkaitan dengan PTSP, dimana IMB lokalnya berbasis standar.
- Tentang OSS belum maksimal di daerah seperti supermarket, sebenarnya perijinan mengenai perhubungan tidak terkait dengan OSS. Mengenai supermarket ini sebenarnya ada regionalisasi dan size yang diatur oleh Kemendag, dan juga dalam PTSP. Sehingga perlu sinkronisasi, karena launching OSS tahap II ini memang baru 9 Agustus kemarin.
- Subsidi upah diberikan kepada pekerja di daerah dengan PPKM level 3 dan level 4, dimana Bali memenuhi persyaratan itu. Dan targetnya adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta ke rekening pekerja yang sama sebelumnya dan diberikan oleh Kemenaker RI. Targetnya juga harus merupakan pengiur BPJS Ketenagakerjaan aktif.
- Bantuan hibah dalam bentuk BPUM untuk usaha kecil menengah, penyalurannya untuk sekitar 9,8 juta pelaku usaha sudah disalurkan dengan besaran Rp 11,76 triliun. Di TW III 2021 akan ada penambahan untuk sekitar 3 juta peserta (penerima) baru dengan tambahan anggaran sekitar Rp 3,6 triliun ditambah 1 juta bantuan PKL dalam bentuk cash. Sehingga total akan ada tambahan 4 juta peserta / penerima bantuan langsung. Total anggaran untuk penambahan tersebut Rp 4,8 triliun, dan itu semua seluruhnya HIBAH.



SESI TANYA JAWAB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI

Jawaban:

- Prinsipnya kredit restrukturisasi bukan bersifat massal, artinya masing-masing perusahaan (debitur) harus aktif mengurus dan juga tergantung pada sektor industrinya masing-masing. POJK 48/2020 tersebut memang akan berakhir di April 2022, namun kita sedang berupaya memperpanjang 1 tahun saja hingga 2023 agar persyaratan perbankan tidak perlu memperbesar proteksi untuk menjaga capital adequacy ratio nya. Namun untuk pelaku usaha berorientasi ekspor tentu akan diberikan prioritas oleh perbankan dan Pemerintah sudah memberikan penjaminan kepada perbankan dalam melakukan restrukturisasi.
- Apabila ingin memperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun, Pemerintah pun mencermati adanya backlog pasca pandemi. Selain itu, Pemerintah memang melihat peningkatan jumlah kasus PKPU dan Kepailitan sampai dengan sekarang sebanyak 480 kasus.
- Pemerintah sudah punya banyak paket untuk UMKM, bantuan langsung, subsidi, perijinan di OSS juga cukup mendaftarkan saja. Sertifikasi Halal untuk UMKM sudah digratiskan. Sudah ada BPJPH untuk mengatur itu.



- Pemerintah melakukan monitoring kepada perbankan serta proyeksi recovery ekonomi nasional yang berbasis tahunan, bukan 3-tahunan. Tentunya dengan asumsi tidak adanya varian virus COVID-19 yang baru nantinya. Hasil TW II 2021 nasional dan berbagai negara juga menjadi bahan kami untuk melihat bahwa cukup melihat basis 1-tahunan saja. Selain itu kondisi restrukturisasi hutang Pemerintah anggap bersifat unik dan tidak seragam untuk semua sektor korporasi.
- UU Ciptaker juga mengatur bahwa MUI menetapkan sidang, dan kemudian ditetapkan BPJPH, apalagi untuk UMKM biaya perijinan dan sertifikasinya sudah digratiskan. Jadi UU Ciptaker sudah mengatur bahwa sertifikasi dan perijinan halal bukan diatur oleh Kementerian.

CEO DIALOGUE

12

Penanganan Krisis Kesehatan Sebagai Basis Pertumbuhan & Ketahanan Ekonomi

Oleh: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

- Tren angka positif COVID-19 hingga 23 Agustus 2021 memang telah mengalami penurunan. Total positivity rate sekitar 3,9 juta orang (hampir 4 juta), dengan yang sembuh sekitar 3,6 juta orang.
- Bagaimana kita menerapkan strategi yang tepat untuk melandaikan wabah ini.
- Kita akan hidup terus berdampingan dengan pandemi seperti ini, oleh karena itu bagaimana kita
- Harapan kita agar positivity rate dapat ditekan ke angka 5%.
- Ketersediaan obat di apotik sekarang dilakukan secara online dengan BUMN. Daerah mana yang kurang obat, oksigen, dll.
- Ketersediaan oksigen di RS di Jawa dapat ditangani. Sekarang bagaimana agar di luar Jawa dapat ditangani juga dengan baik.



- Kami memantau kebutuhan vaksin, oksigen dan obat, terutama dari luar Jawa.

- Kenaikan stok vaksin domestik signifikan kenaikannya.

- Target vaksinasi per hari 2,5 juta. Saat ini masih hanya 1 juta per hari.

- Penguatan aplikasi peduli lindungi.

melakukan deteksi dengan melakukan tes setiap hari, yang dilakukan 3X lipat dibandingkan yang terdahulu. Tes yang dilakukan bertujuan lebih ke tracing.

- Memperkuat juga RS, tempat tidur, sumber daya manusia, tenaga nakes cadangan, pemantauan juga untuk isolasi mandiri, telemedicine, dokter untuk konsultasi. Sosialisasi vaksinasi dengan bantuan pemuka agama, dll.
- Vaksinasi di Indonesia telah mencapai lebih dari 80 juta orang (vaksin ke-1).
- Pekerja-pekerja di luar juga menjadi perhatian penerapan prokes selain di sentra-sentra usaha lainnya.
- Kemenkes juga mendorong penambahan produksi produksi-produksi medis dalam negeri.
- Dengan reformasi kesehatan yang dilakukan, maka bagaimana kita hidup dengan pandemi, bagaimana pola hidup kita berubah, bagaimana tetap produktif dan inovatif ditengah pandemi, dengan dukungan inovasi dan teknologi farmasi dan supporting medis lainnya.

SESI TANYA JAWAB

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Pertanyaan:

- Terkait pandemi menjadi endemi, bagaimana kebijakan Pemerintah terkait hal itu? Apa konsekuensinya bila kebijakan tersebut dilakukan? Visinya seperti apa? Apa yang harus dilakukan pelaku usaha terkait hal itu?
- DPP APINDO Riau: apa solusi Kemenkes terhadap vaksin COVID-19 yang dinilai tidak ampuh? Apakah saran prokes serta menjaga imun cukup dengan vitamin dan obat herbal?
- Bagi yang sudah dirawat di RS akibat COVID, bagaimana agar tidak terkena lagi?
- DPP APINDO NTT ingin membantu Pemerintah dalam melakukan vaksinasi massal di daerah sekaligus dengan fasilitasnya. Namun bagaimana cara mendapatkan vaksin dan bagaimana alur pengirimannya?
- Vaksin di daerah masih cukup sulit dan tidak merata (DPP APINDO Sumatera Utara).
- Kapan vaksin gotong royong Sinopharm dapat diberikan kepada usia 12 tahun ketas?
- Presiden menargetkan vaksinasi hingga 1-2 juta dosis per hari. Namun ternyata meleset. Apa yang menyebabkan hal itu?
- Mulai 6 September 2021, perusahaan esensial dan kritikal diminta menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening terhadap karyawan dan pengunjung yang masuk ke wilayah produksi atau administrasi. Sarannya bagaimana?
- DPP APINDO Sulawesi Selatan : dapatkah promotif dan preventif diserahkan kepada masyarakat dengan prokes ketat?
- 100 Perusahaan di Bogor atas fasilitasi APINDO telah melakukan vaksinasi ke-1. Namun terkendala karena belum ada pelaksanaan vaksinasi ke-2 dan belum ada solusi dari Dinkes setempat. Apa solusi Kemenkes terhadap kondisi ini?
- DPP APINDO Sulawesi Tenggara : kami memiliki nakes maupun fasilitas untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Tetapi Kemenkes hanya memberikan kepercayaan kepada Puskesmas. Bagaimana agar kepercayaan juga dapat diberikan kepada swasta?
- DPP APINDO Jawa Barat : dari puluhan juta vaksin yang dipegang Pemerintah, berapa sebenarnya rasio yang dimiliki Kemenkes, TNI-Polri, dll? Posisi vaksin-vaksinnya ada dimana sebenarnya?
- Apakah memang varian virus covid akan terus muncul? Dapatkah ditangani? Bagaimana strategi Pemerintah?
- Untuk memaksimalkan PCR test, agar dimaksimalkan labkes di berbagai daerah, agar harga tes dapat ditekan turun, dan juga mengadakan mesin plasma darah untuk terapi di daerah yang belum daerah.
- APINDO Kalimantan Timur : animo masyarakat tinggi tetapi kurang tersedia. Apakah vaksin Sinovac tidak diterima untuk orang yang masuk ke Timor dan Eropa. Dan apakah vaksinasi COVID harus diulang setiap tahun?
- DPP APINDO Kalimantan Utara : apakah ada subsidi untuk tes PCR?
- Apakah ada aplikasi yang dapat mengecek ketersediaan vaksin di wilayah Indonesia? Kalau belum, agar diusahakan agar aplikasi tersebut ada.

SESI TANYA JAWAB CEO DIALOGUE

14

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Jawaban:

- Menerapkan protokol kesehatan di semua lini, terutama di pusat perdagangan, pabrik, tempat pariwisata, karena sentra-sentra tersebut yang paling membutuhkan penerapan prokes secara menyeluruh dan ketat.
- Menciptakan kemandirian kesehatan nasional melalui 6 pilar yang ditetapkan Kemenkes, juga bagaimana bisa menciptakan dan memproduksi alat-alat kesehatan dan farmasi di dalam negeri.
- Vaksin bukan berarti langsung kebal, tetapi fungsinya memang meningkatkan imun tubuh. Dan selebihnya tergantung pada daya tahan tubuh.
- Anggaran kesehatan yang ada akan lebih diarahkan kepada hal promotif dan preventif.
- Pelaksana vaksinasi / vaksinator akan ditambah terus dan akan masuk ke daerah-daerah. Sebenarnya ada daerah yang stok vaksinnya banyak tetapi tetap “teriak”. Apakah akibat kurangnya vaksinator?
- Program vaksinasi di berbagai lokasi juga diharapkan agar tidak menimbulkan cluster baru.
- Daerah rata-rata memiliki stok untuk 30-harian.
- Target vaksinasi per hari tertinggi pernah 1,6 juta per hari, dan memang naik turun namun tetap akan mengejar target vaksinasi hingga 2,5 juta dosis per hari.
- Saat ini semua KTP bisa divaksin dimana saja.
- Tentunya menyambut baik apabila promotif dan preventif dapat dilakukan masyarakat secara mandiri.
- Aplikasi mengenai ketersediaan vaksin sudah ada, baik di kementerian, TNI-Polri, dll, termasuk mengkomodir mengenai jumlah permintaan vaksin, tidak hanya ketersediaan.
- Akan menghubungi Dinkes Bogor, sehingga Dinkes setempat dapat meminta vaksin ke TNI-Polri ataupun tempat lain.
- Booster saat ini peruntukannya untuk nakes. Karena banyak masyarakat belum dapat vaksin ke-1.
- Terkait subsidi tes PCR, memang dilakukan gratis untuk 3T. Namun untuk syarat perjalanan tentunya harus berbayar secara mandiri. Harga tes PCR memang telah diturunkan Pemerintah. Saat ini kit tes PCR memang masih impor.
- Kit PCR dan Antigen juga sedang dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan RI apakah mendatang dapat diproduksi di dalam negeri sehingga dapat diturunkan lebih rendah lagi.



CEO DIALOGUE

Penataan Iklim Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Pekerjaan Masa Depan

Oleh: Menteri Ketenagakerjaan RI

IDA FAUZIYAH

“Kemenaker sangat menyambut baik penyelenggaraan Rakerkonas APINDO karena mempunyai peran strategis dan diharapkan menjadi sarana dalam mencari solusi terhadap tantangan dan dinamika iklim Ketenagakerjaan saat ini serta guna membahas secara tuntas bagaimana menyikapi persepsi guna mengantisipasi pekerjaan di masa depan”.

- Tantangan yang masih dihadapi saat ini oleh dunia global termasuk Indonesia adalah bagaimana kita dapat mengantisipasi dari adanya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital, otomasi, dan pertukaran data secara cepat dalam segala aspek.
- World Economic Forum dalam laporan terbarunya memperkirakan akan muncul 97 pekerjaan baru dan di saat yang sama terdapat 85 juta pekerjaan yang akan berkurang. Untuk Indonesia, McKinsey dalam laporannya telah memprediksi akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak oleh otomasi serta akan ada puluhan juta pekerjaan baru yang muncul dalam kurun waktu tersebut.
- kita semua, baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus bersiap masuk pada era future of work tersebut.
- tahun 2020 lalu hingga saat ini, kita dihadapkan pada pandemi global, COVID-19 yang berdampak luar biasa pada seluruh aspek kehidupan, terutama pada aspek kesehatan, ekonomi, pariwisata, keberlangsungan usaha dan bisnis, dan keberlangsungan kerja.
- saya yakin, pengurus dan anggota APINDO yang menjadi pemilik dan menjadi pelaku usaha juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19, terutama di masa diberlakukannya PSBB sejak tahun lalu dan PPKM sejak awal Juli hingga saat ini.
- dunia kini digerakkan oleh artificial intelligence dan big data. terjadinya skill transformation, job transformation dan societal transformation menyebabkan distrupsi ekonomi dan transformasi di bidang ketenagakerjaan.
- Dunia bergerak dari arah *old economy* ke arah *new economy*. Selain menciptakan peluang jenis pekerjaan baru, banyak jenis usaha dan jenis pekerjaan yang tidak berkembang, bahkan

mungkin akan hilang.



CEO DIALOGUE

Penataan Iklim Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Pekerjaan Masa Depan

Oleh: Menteri Ketenagakerjaan RI

IDA FAUZIYAH

- sangat dipahami bahwa kondisi ini sungguh berat, tidak hanya bagi pengusaha, namun percayalah bahwa para pekerja dan kami, pemerintah, merasakan beratnya dampak dari pandemi COVID-19 dan kita tidak mungkin diam saja menghadapi masalah ini. Kita semua sudah, sedang, dan akan terus berjuang untuk tetap bisa bertahan.
- merespon dampak negatif pandemi COVID-19, sejak tahun lalu pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan relaksasi, insentif, dan subsidi yang bertujuan untuk meringankan beban para pengusaha.
- pemerintah juga telah dan sedang memberikan subsidi dan bantuan sosial bagi segenap pekerja dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
- Khusus bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM, per hari ini kami telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi kurang lebih 2,1 juta pekerja dari target 8,7 juta pekerja yang diproyeksi menjadi penerima BSU sesuai kriteria yang tercantum dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenaker nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian BSU Bagi Pekerja atau Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Setiap pekerja penerima BSU ini akan menerima 1 juta Rupiah dari Pemerintah melalui transfer langsung dari Bank Himbara ke rekening pekerja.
- BSU dan bansos lainnya adalah wujud dari *sharing the pain* di masa sulit. Sebagaimana Deklarasi Gotong Royong yang kita lakukan di Gedung Kemaker pada 13 Juli 2021 dilanjutkan dengan hal yang sama pada 5 Agustus 2021, Deklarasi Gotong Royong ini merupakan satu komitmen moral dari 3 pihak: pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam memenangkan Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.
- saya sangat senang dan apresiasi kepada APINDO yang menjadi bagian dari Deklarasi Gotong Royong ini. Saya mengambil kebijakan dalam bentuk intervensi langsung seperti relaksasi, insentif, dan bansos. Pemerintah juga memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitas di tempat kerja, terutama yang terkait dengan hubungan kerja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 104 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja selama pandemi COVID-19.
- Kepnaker nomor 104 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pelaku usaha dalam mengatasi dinamika pelaksanaan hubungan kerja, terutama saat kebijakan PPKM yang masih kita terapkan sampai saat ini.
- Kepnaker nomor 104 tahun 2021 ini mencakup tiga hal: 1) pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau *Work From Home*, bekerja di kantor atau dari tempat kerja atau *Work From Office* dan merumahkan pekerja. 2) pelaksanaan upah dalam ketiga sistem kerja tersebut dan pengaturan hak-hak pekerja lainnya yang berkaitan dengan pengupahan. 3) pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai jalan terakhir dapat diambil jika pandemi COVID-19 benar-benar berdampak luar biasa terhadap keberlangsungan usaha. Hal utama yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan ketiga hal tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan bersama dan tertulis antara pengusaha dan pekerja.

CEO DIALOGUE

Penataan Iklim Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Pekerjaan Masa Depan

Oleh: Menteri Ketenagakerjaan RI
IDA FAUZIYAH

- Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga membawa dampak positif. Pandemi ini secara tidak langsung meningkatkan penggunaan teknologi dalam aktivitas kerja, membuat fleksibilitas ruang dan waktu sehingga pekerjaan tidak harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah revolusi industri 4.0.
- Pemerintah pun memanfaatkan teknologi melalui aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini akan menjadi instrumen vital proses piloting pelaksanaan kerja 100% di beberapa perusahaan terutama dalam memonitor dan mengendalikan aktivitas bekerja di perusahaan. Aplikasi ini bersifat real-time, terpadu, dan disimpan menjadi big data di Kemeninfo.
- Pemerintah sedang menyiapkan roadmap memasuki masa endemi ini. Bapak/ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengapresiasi acara hari ini yang tema utama: memutus pandemic COVID-19 dan membangun ekonomi. Semoga dari diskusi ini dapat diperoleh banyak masukan untuk pengembangan kebijakan pembangunan SDM memasuki revolusi industri 4.0, terutama saran kepada pemerintah dalam penataan iklim ketenagakerjaan Indonesia untuk pekerjaan masa depan.
- Terakhir, saya berpesan agar bapak/ibu pengurus dan anggota APINDO terus mendukung iklim ket-

“Saya bangga dengan APINDO yang telah turut aktif dalam membangun derap Langkah penanganan dan pencegahan COVID-19 secara nyata. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman APINDO yang duduk dalam LKS Tripartit Nasional yang telah bersama-sama kami dalam menghasilkan produk pleno LKS Tripartit Nasional yaitu kesepakatan bersama berkaitan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Tempat Kerja”.

- Upaya lainnya adalah dengan mempercepat proses vaksinasi bagi pekerja yang mana akan menjadi prasyarat utama bagi berbagai aktivitas saat ini, termasuk dalam hal bekerja. Oleh karena itu, semua pekerja atau buruh harus segera diberikan vaksinasi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka saat ini kita semua harus bersiap bangkit serta memasuki masa endemi dimana kita harus terbiasa melanjutkan hidup berdampingan dengan virus COVID-19, tentu dengan terus menjaga imunitas jiwa dan raga

enagakerjaan yang kondusif dan harmonis dengan menghindari PHK. Kita perlu untuk selalu mengedepankan dialog sebagai kunci utama dalam mencegah potensi dan menemukan solusi terbaik dari setiap permasalahan hubungan industrial untuk menjaga kelangsungan berusaha dan bekerja. PHK benar-benar dijadikan sebagai Langkah terakhir yang dapat ditempuh setelah melalui berbagai upaya dalam menyikapi dalam hubungan industrial.

PEMBACAAN TATA TERTIB

18

Oleh: Sekretaris Umum APINDO, Eddy Hussy

1. Pimpinan Sidang baik Pleno maupun Sidang Komisi adalah DPN APINDO (pasal 37 Anggaran Rumah Tangga APINDO).
2. Peserta / Peninjau mendaftarkan kepesertaan melalui registrasi berbasis on line sesuai dengan tautan yang telah di sosialisasikan ke DPP/DPK APINDO.
3. Peserta / Peninjau diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan substansi acara setelah mendapat ijin Pimpinan Sidang paling lama 3 (tiga) menit.
4. Pimpinan Sidang berhak menghentikan pembicaraan yang dipandang keluar/menyimpang dari substansi pembahasan.
5. Peserta/Peninjaw dilarang / tidak dibenarkan menyampaikan kata-kata yang tidak pantas bernuansa SARA, berpromosi atau berkampanye politik. Rakerkonas APINDO fokus membahas permasalahan perekonomian nasional dan internal organisasi APINDO.
6. Pimpinan Sidang (DPN APINDO) berhak mengambil tindakan tegas demi kelancaran jalannya persidangan / acara Rakerkonas APINDO.
7. Semua hasil materi Presentasi Narasumber dan Hasil Sidang Komisi akan dikirim ke Peserta/Peninjaw melalui DPP APINDO.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional
Asosiasi Pengusaha Indonesia

Pimpinan Sidang

Hariyadi B. Sukamdani
Ketua Umum

Suryadi Sasmita
Wakil Ketua Umum

Shinta Widjaya Kamdani
Wakil Ketua Umum

Eddy Hussy
Sekretaris Umum

Anthony Hilman
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga

PEMAPARAN KEGIATAN DPN APINDO TAHUN 2020-2021



Bidang Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial

1. Kegiatan utama Bidang Ketenagakerjaan DPN Apindo pada tahun 2021 adalah mengawal pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja (UUCK) untuk substansi Ketenagakerjaan yang terdiri dari PP PKWT, Alih Daya, WKWI (Waktu Kerja Waktu Istirahat), PHK, PP Pengupahan, PP JKP, PP Penggunaan TKA.
2. DPN APINDO juga aktif dalam pengawalan program MLT Perumahan BPJS Ketenagakerjaan yg saat ini sudah masuk proses sinkronisasi di KemenKUMHAM.
3. Berperan aktif dalam kelembagaan tripartit tingkat nasional, diantaranya LKS Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, Komite Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Berperan aktif dalam pembahasan krusial untuk para pelaku usaha pada tahun 2021, diantaranya: Advokasi untuk penerbitan Surat Edaran Menaker RI untuk relaksasi pembayaran THR keagamaan 2021 dan negosiasi dari pemberi kerja terkait Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021.
5. Terlibat aktif dalam membantu perusahaan anggota Apindo dalam advokasi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pemberian advisory baik terhadap persoalan hubungan industrial yang bersifat kasus ataupun bukan kasus.
6. Berperan menjadi representasi DPN Apindo dalam melakukan kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan SDM yang handal, serta melakukan berbagai kerjasama dan koordinasi untuk program re-skilling dan upskilling.
7. Berperan aktif dalam penyelenggaraan dan mendukung sebagai narasumber dalam beragam kegiatan Apindo Members Gathering, Webinar atau Kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, K3, atau penanganan pandemi Covid-19.

Bidang Perbankan, Jasa Keuangan, Pasar Modal, & Perpajakan

20

1. Bidang Perbankan aktif berpartisipasi pada program advokasi APINDO dan menggalang lebih 25 Ketua FORUM ASOSIASI beserta PERBANAS dalam memastikan Penyempurnaan POJK No. 48/2020. Advokasi APINDO ini dikhususkan pada upaya penyempurnaan POJK No 48/2020, tentang perpanjangan masa restrukturisasi kredit dalam mengatasi kendala ekonomi karena pandemic Covid.
2. Sejak 2019, DPN APINDO telah menggulirkan dorongan dan advokasi kebijakan untuk menggunakan Local Currency Settlement (LCS) dalam hal transaksi ekspor import. Pada Juli 2021, Gubernur BI Perry Warjiyo, telah menuntaskan transaksi penggunaan mata uang lokal antar negara atau local currency settlement (LCS) untuk Indonesia dan China, seluruh persyaratan dan teknis operasional LCS antara Indonesia dan China sudah selesai, dan bank sentral telah menunjuk beberapa bank untuk mendukung transaksi LCS Indonesia - China.
3. Advokasi terkait dengan DIRE (Dana Investasi Real Estate) telah dan terus menerus dilakukan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, untuk mekanisme pengurangan biaya BPHTB.
4. Advokasi APINDO bidang ini juga mengarah pada masalah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan pendanaan yang terjangkau dan bersifat jangka panjang serta berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PP No. 25/2020 terkait aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini dipandang redundant dengan tabungan perumahan sudah termasuk dalam BPJS Ketenagakerjaan dan tidak terintegrasi dengan BP Tapera sehingga tidak efisien.
5. Bidang ini juga aktif berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada isu-isu Pasar Modal Bersama dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), terutama terkait dengan Penerapan POJK 03/ POJK 04/ 2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
6. DPN APINDO juga sangat aktif melakukan koordinasi dan advokasi terkait dengan RUU KUP yang didalamnya terdapat substansi rencana kebijakan Pajak Karbon.



Bidang Properti & Kawasan Ekonomi Khusus

1. Advokasi dalam hal PPH final properti untuk memperjuangkan Relaksasi Jual Beli Rumah/Rusun Non Subsidi dan Jual Beli Rumah / Rusun Subsidi yang tercantum pada PP 34 Tahun 2016.
2. Program pembentukan pengurus PPPSRS dalam hal PP 13/2021 untuk rusun komersial, agar menggunakan praktek yang berlaku secara internasional yaitu proporsional berdasarkan kepemilikan.
3. Koordinasi dengan kementerian ATR/BPN terkait kepemilikan hunian bagi orang asing berkaitan dengan syarat pembelian dalam kepemilikan hunian bagi orang asing
4. Aktif dalam memberikan masukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Sektor Properti dan Kawasan Ekonomi yaitu: (16 RPP)

NO.			
1.	RPP Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	9.	RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.	RPP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	10.	RPP Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
3.	RPP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11.	RPP Hunian Berimbang
4.	RPP Kawasan dan Tanah Terlantar	12.	RPP Rumah Susun
5.	RPP Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah	13.	RPP Bangunan Gedung
6.	RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	14.	RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang	15.	RPP Penetapan Pajak Pusat
8.	RPP Bank Tanah	16.	RPP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

5. Investment Business Talk dengan tema “Strategi Promosi Kawasan Ekonomi ini diselenggarakan dalam Rangka Percepatan Realisasi Investasi ke Indonesia”.
6. Keikutsertaan Kawasan Industri dalam Hannover Messe 2021
7. Implementasi Permen LHK Nomor P5 dan Nomor P6 Tahun 2018 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi PPPA, POPAL, PPPU dan POIPPU serta Tips & Tricks Lulus Uji Kompetensi
8. Forum Diskusi “PP Turunan UU Cipta Kerja bagi Kawasan Ekonomi”

Bidang UMKM

22

1. Program pendampingan UMKM sejak 17 Juni 2020 melalui APINDO UMKM Akademi (AUA) yang sampai saat ini sudah menyentuh lebih dari 29,000 pelaku UKM, dan program ini terus berkembang dengan semakin banyak mitra ekosistem yang terlibat.
2. APINDO memperkuat ekosistem pendampingan UMKM/IKM dengan SMESCO melalui program Sparc Campus.
3. Bidang UMKM juga bekerjasama dengan partner, antara lain: Gerakan Ekosistem Wirausaha Maju (Garuda Food), Desa Madani Peduli Api (Sinar Mas), UKM Indonesia, Top Karir, PT. Agrindo, Diplomat Success Challenge (DSC), ASYX, Utomo SOLARUV, Sekolah Export, Dewan Serat Indonesia, Daruma, BEDO, M Blok Market, Rumah Kreatif Bersama, ISE, dan lain-lain.

NO.	HASIL KERJASAMA DENGAN BEBERAPA PARTNER BIDANG UMKM		
1.	Pembuatan Katalog UKM Jawa	8.	Wawasan Keindustrian Serat Alami
2.	Penguatan SDM, Talent Matching dan Website Gratis	9.	Pembukaan akses pasar untuk UKM produk packaging dan otomotif
3.	Pendampingan Modernisasi Agrobisnis	10.	Pendampingan Digitalisasi, Finance and Business Recovery
4.	Mentoring dan Kompetisi Bisnis	11.	Ekosistem Wirausaha Maju
5.	Fasilitasi Supply Chain Finance & Trade Finance	12.	Desa Madani Peduli Api/Program UKM Ramah Lingkungan
6.	Program UKM Energi Terbarukan	13.	Penguatan Ekonomi Mandiri Perempuan Tangguh Indonesia
7.	Sekolah Ekspor untuk 1000 Eksportir Rempah		

1. APINDO terlibat aktif dalam acara National Consultative Dialogue ILO dengan support EU, UN serta dilaksanakan dengan dukungan IOM dan UNDP serta pembentukan Working group dalam Ship to to Shore Right SEA, launching Januari 2021, dilaksanakan dalam waktu 3 tahun.
2. APINDO aktif sebagai anggota Pokja SAFE Seas (Safeguarding Against and Addressing Fishers' Exploitation at Sea) yaitu perlindungan Awak Kapal dengan nama MAST (Multi-stake holders Initiative for Accountable Supply Chain).
3. APINDO ikut sebagai anggota pokja dalam Tim Nasional Perlindungan Awak Kapal Perikanan yang dibuat lewat Surat Keputusan Kemenkomaritim RI. Tim Nasional ini terdiri dari berbagai Kementerian dan stake holder lain dan ada 3 Pokja.
4. APINDO aktif sebagai anggota Steering Committe untuk SEA Forum for Fishers yang di launching oleh ILO bersama dengan anggota dari negara-negara di ASEAN lainnya.
5. APINDO diundang sebagai narasumber oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University, 22nd Strategic Talk "Tinjauan Kritis UU Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan", dalam hal pasal-pasal yang terkait bidang kelautan dan perikanan.

Catatan pasar utama ekspor hasil perikanan Indonesia berdasarkan nilai harga yaitu: Amerika Serikat, disusul China, Jepang, Thailand, Vietnam.

Pasar utama berdasarkan volume ekspor yaitu : China, Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Malaysia.

Bidang Peternakan

1. Program advokasi dalam hal Revisi Permentan nomor 41 tahun 2019 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia khususnya pasal 8 ayat (1) pelaku usaha peternakan, koperasi peternak, dan kelompok peternak yang melakukan pemasukan bakalan wajib memasukan indukan sebanyak 5% (lima persen) dari setiap rekomendasi.
2. Menghentikan importasi daging kerbau beku dari India.

Keterangan : ternak ruminansia adalah ternak dari kelompok mamalia pemakan tumbuhan yang mengunyah makanannya dua kali, misalnya : sapi.

3. Program Advokasi dalam Revisi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014.
4. Terlibat intensif dalam membangun sistem online perizinan antara kementerian pertanian terintegrasi dengan pemerintah daerah.
5. Program advokasi tentang pembebasan PPh 22 impor untuk usaha penggemukan sapi potong

Bidang Pertanian

24

1. Advokasi program Kemitraan Petani - Inclusive Closed Loop, dimana para pelaku usaha besar yang biasanya berperan sebagai industri pengolahan dan distribusi bermitra dengan para petani dan pemangku kepentingan lainnya membentuk ekosistem saling terhubung dan saling menguntungkan (Simbiosis Mutualisme) dan berkelanjutan (Sustainable).
2. Melawan Kampanye Negatif Komoditas Indonesia,
3. Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan dalam membuat Kampanye Positif Komoditas Pertanian.
4. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk membenahi tata kelola mendukung dan pencapaian ESG (Environment, Social and Governance).
5. Mencari dan membuka pasar-pasar baru di wilayah global.
6. Membenahi isu deforestasi dan pemanfaatan hutan.
7. Advokasi Peraturan dan Kebijakan dengan tujuan kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Bidang Perhubungan

1. Program advokasi Regulasi sektor Perhubungan dan Insentif dalam masa pandemic
2. Program advokasi Peningkatan Kapasitas penyediaan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang fokus pada sistem transportasi multimoda dengan transportasi laut sebagai backbone.
3. Program advokasi regulasi dan implementasi kebijakan zero ODOL dan penurunan pajak untuk truck multi axel.
4. Program advokasi yang mendorong lembaga pendidikan SDM transportasi untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
5. Program Advokasi dalam hal peningkatan efisiensi dan produktifitas layanan kepelabuhanan dan kebandarudaraan
6. Program Advokasi dalam hal Kebijakan Energi Nasional untuk angkutan jalan, untukantisipasi masa depan ketersediaan energi fosil yang kedepan semakin menipis.
7. Program Pemberdayaan Industri Transportasi, dalam hal keringanan fiskal serta perlakuan yang sama (equal treatment) bagi industri transportasi nasional, untuk mendorong daya saing dengan internasional, dan terkait dengan asas cabotage mengingat Indonesia merupakan pasar yang bagus yang membuat banyak pihak berkeinginan adanya relaksasi asas cabotage.

Bidang Perdagangan

1. Program advokasi kebijakan export promotion,
2. Program advokasi peningkatan pemasaran internasional pada perusahaan menengah dan besar yang memiliki akses ke pasar luar negeri;
3. Penyediaan informasi pasar dan potensi ekspor ke negara-negara tertentu bagi usaha mikro, kecil dan menengah; dan
4. Upaya perlindungan lebih optimal bagi produk nasional di pasar ekspor.
5. Menerbitkan buku “Pengaturan Perdagangan Pasca Revisi Undang-undang Perdagangan”

Bidang Kebijakan Publik

1. Program Advokasi mengawal amandemen UU Persaingan Usaha dan Peraturan-peraturan KPPU.
2. Program Advokasi mendorong upaya amandemen UU Kepailitan untuk menyelamatkan pelaku usaha agar tidak dipailitkan dalam masa pandemic.
3. Program Advokasi membantu pemerintah untuk menanggulangi covid 19 dengan mengupayakan vaksinasi bagi pekerja, bekerjasama dengan Kemenkes/Dinkes, TNI, POLRI, Kadin/Biofarma (Vaksin Gotong Royong, sudah dilakukan pada lebih dari 500 ribu dosis di Kepri, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Dalam waktu dekat, insya Allah akan mendapatkan tambahan 678 ribu vaksin bekerjasama dengan OJK.
4. APINDO juga selalu bersikap kritis yang konstruktif dalam melakukan tekanan publik demi menurunkan harga test PCR.

Bidang Organisasi

1. Membantu penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, di tahun 2021 sudah dilaksanakan Musprov di 5 Provinsi (DPP Aceh, DPP Kalimantan Utara, DPP Jawa Tengah, DPP Jawa Barat, DPP Lampung).
2. Melakukan pendampingan pada agenda Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi
3. Penerbitan sertifikat nasional dan sistem database keanggotaan digital.
4. Perencanaan dan pelaksanaan Pembuatan Buku 70 Tahun APINDO.
5. Perencanaan dan pelaksanaan perbaikan terhadap PO (Peraturan Organisasi) APINDO.

Bidang Hubungan Internasional

26

1. Bidang Hubungan Internasional sangat aktif dalam mendukung pemerintah terkait perundingan multi lateral dan bilateral.
2. Bidang Hubungan Internasional juga sangat intensif mendorong kerjasama investasi dan perdagangan dengan Jepang.
3. Aktif dalam Program Kemitraan dengan partner internasional (ILO, AOTS, DECP, CNV, dan lain sebagainya).
4. Ketua Umum APINDO sejak Mei 2021, terpilih menjadi Presiden ACE (Asean Confederation of Employers).

Informasi Tentang ACE

ACE beranggotakan organisasi pengusaha di Asia Tenggara, yaitu Apindo, Malaysian Employers Federation (MEF), Singapore National Employers Federation (SNEF), Employers Confederation of Thailand (ECOT), Employers Confederation of the Philippines (ECOP), Cambodian Federation of Business Agency (CAMFEBA), Laos National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI), The Brunei Chamber of Commerce and Industry (BCCI), dan Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).



REKOMENDASI RAKERKONAS APINDO 2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, RAKERKONAS APINDO tanggal 24 Agustus 2021 menghasilkan sejumlah hal berikut ini:

I. BIDANG KEORGANISASIAN

1. Akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) AD/ART APINDO, DPP diharapkan menyiapkan usulan-usulannya kepada DPN APINDO.
2. Penerbitan Buku 70 Tahun APINDO yang rencana akan dilaunching bersama dengan ulang tahun APINDO di awal tahun 2022.
3. Penyusunan database keanggotaan APINDO berbasis database virtual dengan ID dari NIB
4. Penerbitan Sertifikat Tanda Anggota (STA) APINDO, DPP/DPK diharapkan melengkapi database anggota sesuai formulir DPN APINDO.
5. Untuk memenuhi PP No.35 dan PP No.36 terkait dengan LKS Tripartitda dan Dewan Pengupahan di daerah tingkat Kabupaten/Kota maka DPP APINDO diharapkan membentuk APINDO tingkat Kabupaten/Kota.
6. Untuk kepentingan meningkatkan peran partisipasi keorganisasian DPK APINDO, maka dalam setiap forum nasional APINDO seperti Rakerkonas dan Munas APINDO, DPP perlu menghadirkan DPK sesuai jumlah DPK yang ada pada DPP APINDO tersebut sebagai peninjau.
7. Rapat Kerja Konsultasi Provinsi (RAKERKONPROV) perlu diadakan oleh DPP sebagai legalitas bagi DPP/DPK dan wadah koordinasi DPP dengan DPK.
8. Peraturan organisasi (PO), DPN telah membentuk tim untuk membuat PO, sudah dihasilkan 13 Draft PO untuk dibahas.

II. BIDANG PROGRAM KERJA

Program Kerja Bidang Ketenagakerjaan

1. Literacy & awareness inklusifitas di tempat kerja ke daerah - daerah
2. Pemanfaatan Unit Layanan Disabilitas di daerah
3. Sosialisasi UUCK & PP turunannya bisa dikawal dgn baik
4. Link and Match untuk Sumber Daya Manusia
5. Kesiapan HR untuk menyikapi kemungkinan pandemi menjadi endemi
6. Perlu panduan mitigasi resiko implementasi UUCK
7. Penguatan bidang - bidang Advokasi di DPP & DPK
8. Penguatan keterwakilan APINDO di TRIPDA terkait pengupahan, dsb
9. Perlu adanya solusi hubungan antar Lembaga antara Apindo dengan Kadin di daerah
10. Adanya BLK di daerah yang dibentuk APINDO, karena BLK pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan market, agar dapat dilatih menjadi entrepreneur
11. Pemagangan untuk mendapatkan insentif perpajakan bagi perusahaan yang menampung tenaga magang

REKOMENDASI RAKERKONAS APINDO 2021

28

Program Kerja Bidang Perdagangan

Terkait dgn tata niaga perdagangan international dimana produsen batu bara tidak bisa menjual langsung harus melalui trading company, ada masalah mengenai LC

Program Kerja Bidang Properti & Kawasan Ekonomi Khusus

1. Properti:

- Mengingat tidak adanya kementerian khusus, maka diperlukan dibentuk semacam dewan/badan
- Diperlukannya rencana tata ruang / wilayah propinsi (pendekatan formal n informal)

2. KEK: Dibentuk 1 badan, langsung bertanggung jawab ke Presiden: Industrial Boards, di bawah Presiden yang mempunyai kewenangan

Program Kerja Bidang UMKM/IKM

1. Pembentukan Informasi & Akses Pasar:

- Business Matching, AUA TRADE
- eCatalog (by UMKM & Komunitas)

2. On-Boarding UMKM Ekosistem yang terukur & terstruktur melalui:

- Profiling UMKM & Komunitas Management System
- UMKM Services Ekosistem (pendanaan, logistic, tenaga kerja, dll)
- UMKM Analytic
- SDG Analytic

3. Pendampingan Kewirausahaan & Skill

- Webinar & Masterclass
- Mentorship
- Forum Diskusi (Peer to Peer Learning)

4. PPP (Public Private Partnership)

- Pemerintah, Pengusaha, Akademisi, NGO, Women Empowerment
- Kebijakan Pemerintah
- Kampus Merdeka

DPN APINDO mengundang DPP/DPK & komunitas UMKM untuk Onboarding ke AUA (APINDO UKM Academy), UMKM yang bisa bergabung: UMKM; Komunitas UMKM (Asosiasi, Koperasi, Swasta, Akademisi, Perkumpulan); Pendamping & Program, Off-Taker / Buyer

REKOMENDASI RAKERKONAS APINDO 2021

Program Kerja Bidang Perikanan

Kerjasama Program ILO dengan APINDO untuk:

1. Melindungi Tenaga Kerja di perkapalan / penangkapan ikan serta pengolahan
2. Perlindungan pekerja perempuan di sektotr penangkapan ikan/ pengolahan
3. Dicantumkannya sector perikanan pada badan pangan nasional

Program Kerja Bidang Industri

1. DPN harus mendorong roadmap industri berdasarkan neraca komoditas dan competitiveness
2. Struktur sumber daya manusia, kurang link and match dengan dunia industri, maka harus di restrukturisasi dengan kurikulum, pekerjaan yang akan hilang dan muncul

REKOMENDASI RAKERKONAS APINDO 2021

30

III. BIDANG REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk perbaikan daya saing Indonesia agar berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan 5,00% di tahun 2021, serta target target makro ekonomi ekonomi yang disampaikan Presiden dalam Nota Keuangan 2022 yaitu pertumbuhan 5.0-5.5%, inflasi 3%, kurs USD 14.350 dan harga minyak 63USD/barel, RAKERKONAS APINDO menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi di bawah ini.

A. Upaya Penanganan Pandemi COVID-19

1. Dunia usaha berharap Pemerintah dapat menggencarkan penanganan COVID-19 melalui 3T (Testing, Tracing, dan Treatment), percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity, implementasi biaya test PCR di Jawa Bali maksimum Rp 495 ribu dan di luar Jawa dan Bali menjadi Rp 550 ribu, serta terus mengupayakan penurunan harga secara berkelanjutan, dan ketersediaan obat yang dapat dijangkau masyarakat.
2. Mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional apabila sudah melakukan vaksinasi minimal 2 kali untuk seluruh karyawannya.
3. Mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional dan tetap mengikuti proses secara ketat bilamana karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksin minimal 2 kali dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kemenperin.
4. Pemerintah diharapkan memberikan tambahan dana dan percepatan realisasi pencairan anggaran stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021 untuk mendukung bangkitnya sektor-sektor ekonomi produktif.
5. Apresiasi terhadap Pemerintah yang telah kembali menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap kedua senilai Rp 3,6 triliun bagi tiga juta peserta baru yang perlu terus ditingkatkan mengingat masih banyak pelaku usaha mikro yang belum paham cara mendapatkannya
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/2020 agar diperpanjang per 3 tahun atau hingga 2024 mengingat belum redanya pandemi C19 agar sektor riil melalui relaksasi yang panjang tersebut para pelaku usaha bisa menyesuaikan kemampuan mereka dalam membayar kredit. Nilai agar tidak dibatasi 10Milyar dan penilaian bank hanya berbasis pada 1 pilar yaitu cash flow. Selain itu diperlukan perlindungan kepada Perbankan yang memberikan insentif/stimulus untuk dunia usaha
7. Pemerintah diharapkan untuk mempercepat realisasi kebijakan terkait write off kredit bermasalah untuk UMKM yang telah diatur dalam POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
8. Keringanan biaya listrik agar pengusaha mampu bertahan di masa pandemi melalui cara PLN tidak memungut biaya beban dasar listrik dan menghilangkan tarif premium service yang sangat memberatkan perusahaan di masa pandemi ini, serta discount tarif listrik pada jam beban puncak malam hari. Khusus untuk UMKM agar diberikan fleksibilitas dalam pembayaran listrik yang tidak serta merta diputus jika terlambat membayar.

B. Perbaikan Iklim Investasi

1. Apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang telah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berbagai peraturan turunan telah diterbitkan dan oleh karena itu diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya dalam berbagai klaster, utamanya bidang ketenagakerjaan, perijinan usaha, perpajakan, UKM, akses lahan dan lingkungan hidup.
2. Dalam hal ketenagakerjaan, Permenaker No 2/2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa pandemi COVID-19 agar dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dengan mengutamakan dialog antara Pemerintah, Pekerja dan Pemberi Kerja agar dipahami bersama kesulitan pengusaha sehingga jika ada pengurangan pendapatan maka hal ini dikompensasikan dengan bantuan subsidi upah bagi yang telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
3. Masih mengenai ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan jaminan sosial, APINDO menginisiasi kebijakan untuk meningkatkan minat Perbankan dalam mengimplementasikan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan untuk kepemilikan rumah bagi Pekerja melalui penyesuaian regulasi terkait ketentuan tingkat suku bunga perbankan untuk funding dan lending agar memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan, Perbankan Anggota HIMBARA dan ASBANDA memfasilitasi MLT Perumahan bagi Pekerja.
4. Moratorium Undang Undang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau Kepailitan dalam situasi yang sedang sulit akibat pandemi
5. Pelarangan beroperasi bagi perusahaan pelayaran yang tidak bisa menyediakan Container yang cukup untuk kepentingan ekspor
6. Pemerintah agar mengeluarkan Pajak Karbon dari RUU KUP, dengan lebih memprioritaskan skema perdagangan karbon (Carbon Trade) dan insentif pajak sebagai upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menyipkan hal hal berikut: **pertama**, peta jalan energi yang holistik dan komprehensif sehingga dapat dihasilkan instrumen-instrument yang mendorong secara positif bagi pengurangan emisi karbon tanpa menjadi disinsentif bagi perekonomian, lingkungan dan sosial di Indonesia. Peta jalan dibuat dengan mencantumkan potensi energi di setiap daerah, regulasi, teknologi, pengembangan, penyediaan infratraktur, dan pendanaannya. dari sisi kesiapan rencana bauran energi hingga 2050 (sebagai catatan pada kenyataannya 70% dari seluruh pembangkit listrik yang ada masih menggunakan batu bara). **Kedua**, perdagangan karbon lebih tepat diterapkan dibandingkan pengenaan Pajak Karbon. **Ketiga**, asal-usul tarif pengenaan Pajak Karbon dengan tarif Rp 75.000 per ton karbon, tidak jelas landasan dan kajian akademisnya. **Keempat**, agar Pemerintah lebih mendahulukan pembahasan RUU Ekonomi Sirkular dan Ekonomi Hijau yang mendukung sumber Energi Baru & Terbarukan (EBT) yang kompetitif dan berdaya saing untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. **Kelima**, agar lebih banyak K/L memberikan penghargaan industri hijau sebagai insentif terhadap bertambahnya industri yang menerapkan industri hijau untuk pengurangan emisi karbon dan limbah. **Keenam**, Pemerintah perlu memperkuat posisi di antara negara lainnya terutama benchmark di kawasan ASEAN. Dunia usaha mengkhawatirkan penerapan Pajak Karbon oleh Indonesia, sementara negara-negara ASEAN dan Asia lainnya tidak menerapkan.

REKOMENDASI RAKERKONAS APINDO 2021

32

B. Perbaikan Iklim Investasi

7. Dalam rangka meningkatkan daya saing, kinerja dan daya tahan industri, terlebih lagi dengan deraan pandemi COVID-19, APINDO mengharapkan segera direalisasikannya harga gas industri sebesar 6 dolar AS per Million Metric British Thermal Units (MMbtu).
8. Mengenai penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan global APINDO terus mendorong penggunaan mata uang selain USD, secara khusus mata uang Renminbi (Yuan) sebagai alternatif untuk transaksi perdagangan Indonesia dengan Tiongkok (RRT). Hal tersebut mengingat volume dan nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan RRC yang sangat besar, dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang USD sehingga mengurangi fluktuasi Rupiah. Selain Renmibi, penggunaan LCS lainnya juga perlu dilaksanakan.
9. Terkait isu transportasi-perhubungan, APINDO meminta Kementerian Perhubungan untuk menunda pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih atau zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang ditargetkan pada 1 Januari 2023 sampai batas waktu yang dianggap tepat untuk merealisasikan rencana tersebut agar ada tenggat waktu yang cukup dan mempersiapkan investasi yang besar untuk membeli dan mempersiapkan jenis-jenis truk angkutan baru untuk kebutuhan logistik.
10. Sementara itu dalam perspektif APINDO, pandemi COVID-19 mempercepat akselerasi transformasi digital di masa kini dan pasca pandemi COVID-19, dengan sejumlah agenda berikut: 1) mempercepat transformasi dan memperluas jaringan infrastruktur digital termasuk jaringan 4G dan 5G, satelit multifungsi Satria, data center pemerintah, pembangunan infrastruktur internet secara merata, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), 2) mempercepat dan memperluas literasi digital untuk kesiapan SDM Indonesia, 3) Jaringan Fintech yang Inklusif, terutama untuk membantu perusahaan rintisan dan UMKM. 4) mengoptimalkan penggunaan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis data dari berbagai sumber dengan cepat dan meningkatkan daya saing usaha, 5) Pemerintah perlu membangun sistem keamanan data (data security) di Indonesia, dan 6) Pemerintah menjamin transaksi dalam fin-tech.
11. Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam perijinan usaha perlu dilaksanakan dengan baik dengan menyesuaikan spirit UU Cipta Kerja.



DOKUMENTASI

33







LAMPIRAN

36



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)
Nomor : 258/SK-DPN/1.1/2B/VIII/21**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
RAPAT KERJA DAN KONSULTASI NASIONAL APINDO KE-31 TAHUN 2021**

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO merupakan pertemuan rutin tahunan APINDO seluruh Indonesia sebagai sarana strategis bagi APINDO untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan program serta perbaikan kinerja di tahun berikutnya.
2. Bahwa sesuai hasil Rapat Pleno DPN APINDO dan mengingat masih dalam masa pandemi covid-19 disepakati pelaksanaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Ke 31 Tahun 2021 diselenggarakan oleh DPN APINDO secara virtual (online).
3. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Rakerkonas tersebut, perlu ditetapkan Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggara Rakerkonas APINDO tahun 2021, dalam Surat Keputusan DPN APINDO.
- Mengingat** : 1. Pasal 27 Anggaran Dasar APINDO.
2. Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga APINDO.
- Memperhatikan** : Rapat Pleno DPN pada tanggal 30 Juli 2021

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA DAN KONSULTASI NASIONAL APINDO KE-31 TAHUN 2021**
- Pertama* : Penyelenggaraan Rakerkonas APINDO tahun 2021, dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 2021;
- Kedua* : Membentuk Panitia Penyelenggara Rakerkonas APINDO tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga* : Panitia Pengarah bertugas menentukan arah keseluruhan proses pelaksanaan kepesertaan dan pembahasan materi Rakerkonas APINDO tahun 2021.



- Keempat* : Panitia Pelaksana bertugas untuk mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan teknis penyelenggaraan Rakerkonas APINDO tahun 2021.
- Kelima* : Panitia Penyelenggara wajib melaporkan hasil Rakerkonas kepada DPN APINDO pada kesempatan pertama dalam Rapat DPH DPN APINDO sejak selesainya Rakerkonas.
- Keenam* : Jika dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh* : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 9 Agustus 2021

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO),**

Hariyadi B. Sukamdani
Ketua Umum

Eddy Hussy
Sekretaris Umum



Lampiran SK Nomor : 258/SK-DPN/1.1/2B/VIII/21

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
RAPAT KERJA DAN KONSULTASI NASIONAL APINDO KE-31 TAHUN 2021**

I. PANITIA PENGARAH

1. Hariyadi B. Sukamdani
2. Suryadi Sasmita
3. Shinta Widjaja Kamdani
4. Harijanto
5. Soebronto Laras
6. Anton J. Supit
7. Benny Soetrisno
8. Johnny Darmawan
9. Sanny Iskandar
10. Eddy Hussy
11. Anthony Hilman
12. Adi Mahfudz Wuhadji

II. PANITIA PELAKSANA

- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| Ketua | : | Eddy Hussy |
| Wakil Ketua: | | Danang Girindrawardana |
| Sekretaris | : | Ani Sulistyowati |
| Wakil Sekretaris: | | Anisa Alfadillah |
| Bendahara | : | Chris Setyadi Suhendra |
-
- | | | | |
|----|-----------------------|---|------------------------|
| 1. | Seksi Acara | : | |
| | Koordinator | : | Agus Dermawan |
| | Wakil | : | Cecep Darmadi |
| | Anggota | : | Andiko Wicaksono |
| 2. | Seksi Perlengkapan | : | |
| | Koordinator | : | Iwan Zulkarnain |
| | Anggota | : | Rifki |
| 3. | Seksi Dok / Publikasi | : | |
| | Koordinator | : | Septiyan Listiya |
| | Anggota | : | Triadi Prastyo |
| 4. | Seksi Keamanan: | | |
| | Koordinator | : | M.Septyadi |
| 6. | Persidangan: | | P. Agung Pambudhi |
| 7. | Notulis | : | R. Wahyu Handoko |
| | | | Agung Joko Purnomo, SH |
| | | | Jefry Butar-Butar |
| | | | Safira |
| | | | Tuti Suharti |

Ditetapkan di Jakarta, 9 Agustus 2021

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL APINDO
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA**

Hariyadi B. Sukamdani
Ketua Umum

Eddy Hussy
Sekretaris Umum